



Analisis Faktor Penghambat Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Usaha Desa Sialang Dua Dahan Kecamatan Rengat Barat

Heri Hermanto , Surya Akbar, Khaidir, Monalisa, Raja Nurhayati Maulia

^{1,5} Program Studi Administrasi Bisnis, Universitas Riau Indonesia, Rengat, Indonesia

^{2,3,4} Program Studi Administrasi Negara, Universitas Riau Indonesia, Rengat, Indonesia

*Corresponding E-mail: herihermanto@unrida.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 04 July 2024

Revised: 13 July 2024

Accepted: 20 July

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Riau Indonesia

ABSTRACT

The establishment of BUMDes is one way to utilize the law that gives authority to the village government to innovate in village development, especially in improving the village economy and welfare for village communities. However, in the implementation of the process, BUMDes often experience slow development and stagnation as happened to BUMDes Bina Usaha Desa Sialang Dua Dahan, therefore the author is interested in conducting a study on the obstacles to the development of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Sialang Dua Dahan village which aims to describe the factors that hinder the development of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Bina Usaha Desa Sialang Dua Dahan, West Rengat District, Indragiri Hulu Regency. This research is a type of research using qualitative research (field research/field study). The results of the study explain that many inhibiting factors in the development of BUMDes Bina Usaha are inadequate management governance, lack of cooperation between BUMDes management and village government, lack of community emancipation of BUMDes so that the business process in BUMDes does not run well and the human resources of BUMDes management are not yet competent. Furthermore, the dominant factors inhibiting the development of BUMDes Bina Usaha are (1) the competence of Human Resources (HR) is still lacking, (2) lack of cooperation and communication between the village government and BUMDes Bina Usaha, and (3) low community participation.

Keywords:

Inhibiting factors; Policy; BUMDes; Human Resources

1. Pendahuluan

Kesiapan pemerintah daerah untuk mengelola pemerintahan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan agar terwujudnya pembangunan yang efisien, efektif, akuntabel, transparan dan memiliki partisipasi aktif masyarakat terhadap pemerintahan. Hal ini dapat diawali dari tingkat desa sebagai pondasi utama pembangunan. Salah satu upaya pemerintah untuk mendukung pembangunan desa adalah melalui pemberian Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dana Desa ini memberikan manfaat signifikan bagi desa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa, guna mewujudkan desa yang lebih maju dan mandiri. Dengan adanya peningkatan anggaran menjadikan desa mampu meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakatnya.

Dibalik manfaat besar yang ditawarkan oleh pemberian Dana Desa untuk mempercepat pembangunan di Indonesia, terdapat kekhawatiran akan munculnya beberapa permasalahan. Salah satunya adalah potensi meningkatnya ketergantungan pemerintah desa terhadap bantuan keuangan tersebut. Ketergantungan ini dikhawatirkan dapat menghambat kemandirian desa dalam mengelola keuangan sehingga desa menjadi kurang produktif dalam memanfaatkan potensi dan aset yang dimilikinya secara optimal.

Dengan kehadiran otonomi daerah, desa bisa mengelola sumber daya ekonomi dan keuangannya untuk menunjang peningkatan ekonomi desa dan kesejahteraan rakyat. Desa diberikan kewenangan untuk mengelola potensi yang ada di daerah untuk mewujudkan cita – cita tersebut. Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintah secara keseluruhan, yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus berbagai kepentingan masyarakatnya. Penyelenggaraan pemerintahan ini dijalankan oleh pemerintah desa.

Dalam upaya meningkatkan perekonomian desa yang mandiri, sejalan dengan Undang – Undang Nomor 6 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, pemerintah menetapkan kebijakan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu prioritas dalam penggunaan Dana Desa, sebagaimana diatur dalam Permendes Nomor 19 Tahun 2017, BAB III Pasal 4 (ayat 1 – 5) tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang menegaskan bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, yang bersifat lintas sektor. Sektor dan kegiatan yang dimaksud meliputi pengembangan produk unggulan desa atau kawasan pedesaan, pengelolaan BUMDes atau BUMDes bersama, pembangunan embung serta penyediaan sarana olahraga, yang semuanya disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 ayat (6), dijelaskan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan. Tujuannya untuk mengelola aset, menyediakan jasa pelayanan, dan menjalankan usaha lain guna mencapai kesejahteraan masyarakat desa secara maksimal. Pendirian lembaga usaha desa ini merupakan perwujudan dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumber daya lokal dan pengembangan usaha produktif yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 213 ayat (1) tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa BUMdes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan BUMDes bertujuan untuk mengembangkan daerah pedesaan melalui program pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada peningkatan produktivitas dan diversifikasi usaha lokal, penyediaan sarana serta fasilitas pendukung ekonomi pedesaan, penguatan institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam sebagai landasan utama pertumbuhan ekonomi pedesaan. Menurut Saepudin dkk, (2018:86) Keberadaan BUMDes diperlukan peran aktif masyarakat dalam mengelola program. Tingkat partisipasi masyarakat baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi dapat dikategorikan positif artinya partisipasi masyarakat dinilai cukup aktif. Peran aktif masyarakat sebagai modal utama dalam mengembangkan usaha. Keberadaan BUMDes akan mampu mencapai tujuan sebagai bagian dalam pemberdayaan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Sasaran program berorientasi pada masyarakat dengan tingkat kemiskinan rendah.

Akan tetapi, fakta dilapangan mengungkapkan bahwa kehadiran lembaga BUMDes sejak pertama kali dibentuk sebagai bagian dari program pemerintah ternyata belum bisa memenuhi ekspektasi masyarakat untuk peningkatan ekonomi desa. Keraguan terhadap BUMDes masih banyak dirasakan baik di kalangan masyarakat maupun pemerintah desa. Terlihat rendahnya kepercayaan masyarakat dan internal pemerintah terhadap BUMDes untuk dapat menumbuhkembangkan bahkan menggerakkan aspek sosial ekonomi di desa.

Permasalahan tersebut disebabkan karena lembaga BUMDes belum sepenuhnya mampu mencapai kinerja optimal, sehingga belum dapat berkembang menjadi motor penggerak utama untuk penguatan sosial ekonomi di desa. Meskipun demikian, tidak semua BUMDes mengalami kegagalan, beberapa telah berhasil dengan baik dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat desa. Kecamatan Rengat Barat memiliki 17 BUMDes. Setiap BUMDes mempunyai level perkembangan yang beragam.

Table 1. Klasifikasi Perkembangan BUMDes

Tingkat Perkembangan	Desa	Nama Bumdes
Dasar	Alang Kepayang Bukit Petaling Air Jernih	Tunas Harapan Jaya Barokah Air Jernih Sejahtera
Tumbuh	Barangan Redang Pematang Jaya Danau Baru Tani Makmur Sungai Baung Danau Tiga	Cahaya Barangan Redang Sejahtera Mandiri Karya Jaya Danau Lestari Harapan Jaya Berkah Mandiri Tirta Jaya Mandiri
Berkembang	Kota Lama Pekan Heran Rantau Bakung Sialang Dua Dahan Sungai Dawu Tanah Datar	Cahaya Menduyan Bersatu Kita Maju Bakung Berkarya Bina Usaha Maju Jaya Sedawu Bangun Abadi
Maju	Talang Jerinjing	Berkah Mandiri

Sumber: PMD Kabupaten Indragiri Hulu, 2024

Tabel tersebut menunjukkan bahwa BUMDes Bina Usaha termasuk dalam penilaian perkembangan BUMDes pada tingkat ketiga, yaitu tingkat Berkembang. Sekarang ada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Usaha di Desa Sialang Dua Dahan, yang didirikan pada tahun 2018. BUMDes Sialang Dua Dahan memiliki banyak tantangan yang masih memengaruhi upayanya. Namun, potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal dan peningkatan PAD dapat dicapai jika pengelolaan dan pengembangannya dilakukan secara optimal. PAD ini sangat penting untuk pembiayaan pembangunan desa dan infrastruktur lainnya. Keberhasilan BUMDes juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warga Desa Sialang Dua Dahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Unit usaha BUMDes Bina Usaha adalah sebagai berikut:

Table 2. Unit Usaha BUMDes Bina Usaha

No	Jenis Usaha	Unit Usaha	Berjalan/Tidak Berjalan
1.	Perdagangan	Air Galon Gas LPG	Berjalan Berjalan

2.	Penyewaan	Mesin Traktor Mesin Molen	Tidak Berjalan Tidak Berjalan
----	-----------	------------------------------	----------------------------------

Sumber: Laporan Keuangan BUMDes Bina Usaha, 2024

Berdasarkan data dari tabel unit usaha BUMDes Bina Usaha, diperlukan studi lebih lanjut mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) karena terdapat beberapa unit usaha yang sudah tidak beroperasi, sehingga menimbulkan pertanyaan bagi peneliti. Dengan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji hambatan – hambatan berkembangnya Badan Usaha Milik Desa Desa Sialang Dua Dahan dalam sebuah penelitian.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan peneliti untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai faktor – faktor yang menghambat perkembangan BUMDes Bina Usaha Desa Sialang Dua Dahan.

Menurut Zuchri Abdussamad (2021;30) Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini sering disebut dengan *naturalistic inquiry*, atau *field study*. Sedangkan pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara mendalam (Moleong, 2019). pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Menurut Soebardhy, (2020;8), penelitian deksriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran terkait suatu variabel, fenomena, atau keadaan tertentu. Dalam penelitian ini, tidak ada tindakan yang dilakukan seperti dalam penelitian eksperimen. Penelitian deskriptif tidak bertujuan untuk mencari hubungan antara variabel, menguji hipotesis, membuat prediksi, atau memperoleh implikasi, meskipun penelitian yang bertujuan untuk menemukan hal-hal tersebut dapat mencakup metode-metode deskriptif. Jenis penelitian ini berfokus pada prosedur pengumpulan data deskriptif berupa kata-kata, baik lisan maupun tulisan, dari individu atau subjek yang dapat diamati.

Penelitian ini akan dilaksanakan setelah seminar proposal dilaksanakan. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sialang Dua Dahan Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dengan objek penelitian Analisis Faktor yang Menghambat Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Usaha, karena disinilah kurang lebih 5 (lima) tahun BUMDes Bina Usaha Desa Sialang Dua Dahan Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dibentuk dan dikelola.

Table 3. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Jadwal	Lokasi
Jumat, 27 Oktober 2023	Kantor Desa Sialang Dua Dahan
Jumat, 27 Oktober 2023	BUMDes Bina Usaha Desa Sialang Dua Dahan

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2024

Untuk populasi dan sampel, peneliti menggunakan metode *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2018:216) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti, oleh karena itu peneliti memilih *purposive sampling* yang menetapkan pertimbangan atau kriteria-kriteria

tertentu. Adapun criteria informan penelitian yang peneliti anggap mampu dan mengetahui permasalahan ini, ciri-cirinya antara lain:

- a. Berada di daerah yang diteliti;
- b. Mengetahui kejadian/permasalahan;
- c. Bisa berargumentasi dengan baik;
- d. Merasakan dampak dari kejadian/permasalahan; dan
- e. Terlibat langsung dengan permasalahan.

Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi lebih jelasnya tentang data key informan dan informan dalam penelitian ini maka dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Table 4. Data Informan Penelitian

No.	Keterangan	Teknik Pengambilan Data	Nama Informan	Jumlah Informan
1.	Kepala Desa Sialang Dua Dahan	Wawancara	Nasrun Arsyad	1 Orang
2.	Sekretaris Desa Sialang Dua Dahan	Wawancara	Jub Premi	1 Orang
3.	Ketua BUMDes Bina Usaha	Wawancara	Hendra Putra Jaya	1 Orang
4.	Bendahara BUMDes Bina Usaha	Wawancara	Sutoyo	1 Orang
5.	Masyarakat Desa Sialang Dua Dahan	Quesioner	A. Ayu B. Chalvin C. Eko D. Sieto E. Bustami F. Edi Ahmad G. Widodo H. Syukur I. Jusnawati J. Bayu	10 Orang
Total				14 Orang

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2024

Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui kegiatan wawancara atau mengisi kuesioner yang artinya sumber data ini langsung memberikan data kepada peneliti. Dalam hal ini data primer yang peneliti ambil yakni melalui wawancara dan memberikan kuesioner kepada narasumber/informan di antaranya, Kepala Desa Sialang Dua Dahan, Sekretaris Desa Sialang Dua Dahan, Ketua BUMDes Bina Usaha, Bendahara BUMDes Bina Usaha, dan Masyarakat. Sedangkan untuk data sekunder yang peneliti gunakan pada penelitian kali ini di antaranya, Profil Desa Sialang Dua Dahan, Evaluasi Perkembangan Desa, Profil BUMDes Bina Usaha, serta laporan catatan penghasilan BUMDes Bina Usaha.

Sementara untuk pengumpulan data menggunakan Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk Teknik analisis data, peneliti mengimplementasikan konsep dari Hubberman dan Milles yaitu kegiatan dalam analisis data kualitatif peneliti laksanakan secara interaktif serta berlangsung secara berkelanjutan sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas yang dilaksanakan peneliti dalam analisis data yakni sebagai berikut:

- a. Reduksi Data

Mereduksi data yaitu peneliti merangkum, memilih hal-hal yang utama memfokuskan pada hal-hal yang esensial, mencari tema serta polanya juga membuang yang tidak dibutuhkan. Dengan demikian data yang telah direduksi mampu memberikan gambaran yang lebih detail, sertamemudahkan peneliti untuk melaksanakan pengumpulan dan selanjutnya, reduksi data ini berlanjut terus sesudah penelitian di lapangan sampai pada laporan akhir lengkap tersusun.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi oleh peneliti, langkah selanjutnya adalah menyajikan data ke dalam bentuk yang lebih sederhana, seperti uraian ringkas, bagan, hubungan antar indikator, tabel informan, atau gambar kerangka pikir. Penyajian data ini memudahkan peneliti untuk memahami peristiwa yang terjadi dan merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh. Dalam klasifikasi analisis ini, data disusun dengan cara yang terorganisir sehingga memudahkan penarikan kesimpulan yang tepat.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Setelah data disajikan dan diolah oleh peneliti, kesimpulan yang dihasilkan pada tahap awal seringkali bersifat tentatif, kabur, kaku dan meragukan, sehingga perlu dilakukan verifikasi lebih lanjut. Pada tahap ini, peneliti tidak menghentikan prosesnya, melainkan terus melakukan pengecekan dan pembaruan terhadap kesimpulan yang diambil berdasarkan data sebelumnya. Proses verifikasi ini dilakukan sepanjang penelitian berlangsung, guna memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan akurat, dapat dipercaya, dan tidak menimbulkan keraguan.

3. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum BUMDes Bina Usaha Desa Sialang Dua Dahan (Sejarah Penyertaan)

Awal pembentukan BUMDes Bina Usaha adalah tahun 2018, pada saat itu pemerintah Desa Sialang Dua Dahan memberikan modal kepada BUMDes Bina Usaha melalui penyertaan modal yang tertera di Perdes No 9 tahun 2018 dengan nilai Rp.55.000.000,00. Selanjutnya modal ini dimanfaatkan untuk pembentukan Unit Usaha Depot Air Minum.

Ditahun 2019, melalui BKK 2019 Pemdes Sialang Dua Dahan kembali menggelontorkan dana penyertaan modal sesuai perdes tahun 2019 dengan jumlah Rp. 125. 000.000, 00 kembali kucuran dana segar ini dipergunakan untuk penambahan modal Unit Usaha Depot Air Minum, Unit Usaha Molen Dan Unit Usaha Gas LPG 3 Kg.

Kembali ditahun 2021, melalui Dana Desa Sialang Dua Dahan BUMDes Bina Usaha kembali memberikan tambahan modal berupa barang Hendraktor. Barang ini di dimanfaatkan oleh BUMDes untuk disewakan kepada masyarakat. (BUMDes Bina Usaha, 2023).

Analisa Faktor Penghambat Perkembangan BUMDes Bina Usaha Desa Sialang Dua Dahan

Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. BUMDes merupakan lembaga ekonomi ditingkat pedesaan. BUMDes Bina Usaha merupakan lembaga yang bertujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun dalam perjalanan untuk mencapai tujuan tersebut tentu tidaklah mudah dan memiliki berbagai hambatan yang menghambat perkembangan organisasi tersebut. Dalam hal ini BUMDes Bina Usaha mengalami hambatan perkembangan dan berdampak pada tidak berjalannya beberapa unit usaha yang terdapat pada BUMDes Bina Usaha serta tidak tercapainya tujuan tujuan yang ingin dicapai oleh BUMDes Bina Usaha.

Ketua BUMDes pada kesempatan wawancara menyampaikan kepada penulis terkait perkembangan BUMDes *“BUMDes ini berdiri sejak tahun 2018 dan sejak saat itu berkembang menjadi beberapa unit usaha, namun yang saat ini masih berjalan hanya air minum isi ulang, dan gas LPG, dan unit usaha lain seperti penyewaan traktor tidak berjalan dikarenakan*

masyarakat sudah banyak yang punya traktor sendiri. setiap pertemuan di kantor desa sudah kami beritahu agar masyarakat mau untuk bertransaksi di unit usaha yang kami miliki, namun masyarakat masih kurang berpartisipasi,” (Wawancara Ketua BUMDes Bapak Hendra, 27 Oktober 2023).

Merujuk hasil wawancara tersebut bahwa sejatinya BUMDes Bina Usaha masih memiliki unit usaha berjalan yakni air minum isi ulang dan gas LPG namun ada beberapa unit usaha bagian tani seperti peminjaman traktor yang mandeg dan tidak berjalan dikarenakan banyak masyarakat yang sudah memiliki traktor pribadi dalam mengelola pertaniannya.

Selain itu, sosialisasi terhadap masyarakat sering dilakukan saat acara pertemuan yang dilakukan oleh desa namun masyarakat masih memiliki kurang partisipasi dan dukungan dalam penjalanan unit usaha yang dimiliki oleh BUMDes.

Dalam kesempatan yang sama bendahara BUMDes Bina Usaha bapak Sutoyo menambahkan bahwa BUMDes Bina Usaha pada saat ini berada pada tahap tumbuh dan mengalami stagnansi serta belum berkembang seperti desa lainnya, selain itu pengurus juga kesulitan dalam membuat laporan keuangan sehingga beliau berharap adanya kerjasama dengan pemerintah desa agar menjaring SDM yang mampu dalam menyelesaikan permasalahan administrasi tersebut.

Berdasarkan penjelasan Bapak Sutoyo tersebut, penulis mengetahui bahwa faktor penghambat lainnya yakni kurangnya SDM yang memadai dalam mengelola BUMDes sehingga menyebabkan kurang baiknya tata Kelola BUMDes yang diharuskan memiliki laporan penggunaan dana kepada pihak pengawas.

Selanjutnya setelah melakukan wawancara dengan kepala desa, bapak Nasrun Arsyad beliau menyampaikan bahwa meskipun telah diberikan fasilitas dan dukungan berupa penyediaan bangunan dan pembimbingan oleh pemerintahan desa terdapat beberapa faktor yang menghambat perkembangan BUMDes Bina Usaha.

Bapak Nasrun Arsyad menjelaskan bahwa *“penghambatnya ya itu kurang adanya kerjasama antarsesama pengurus dan kurangnya SDM dalam menjalankan usaha BUMDes menyebabkan terhambatnya perkembangan BUMDes, ditambah lagi dengan kurangnya pemahaman masyarakat akan fungsi BUMDes sehingga masyarakat tidak memanfaatkan unit usaha yang ada di BUMDes”* (Wawancara Kepala Desa, Bapak Nasrun Arsyad, 27 Oktober 2023).

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh bapak Jub Premi, selaku sekretaris desa, *“bahwa selama ini yang menjadi faktor penghambat dalam perkembangan BUMDes adalah SDM BUMDes yang kurang memadai, kurangnya dukungan masyarakat dalam transaksi di BUMDes, kurangnya promosi produk dari pihak BUMDes.”* (Wawancara Sekretaris Desa, Bapak Jub Premi, 27 Oktober 2023).

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan di atas dapat di fahami bahwa terdapat beberapa faktor penghambat yang mendasar dalam perkembangan BUMDes Bina Usaha yakni tata kelola yang masih kurang baik, kerja sama antara pengelola BUMDes yang masih kurang maksimal, serta emansipasi masyarakat yang masih kurang.

Selain melakukan wawancara kepada pengurus BUMDes Bina Usaha dan pemerintahan Desa Sialang Dua Dahan, penulis juga menyebarkan kuesioner kepada masyarakat desa Sialang Dua Dahan yang bukan anggota kepengurusan BUMDes. Hal ini dilakukan agar data yang dimiliki oleh penulis bersifat menyeluruh dan lengkap, sehingga penulis mendapatkan jawaban yang lebih objektif terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

Berdasarkan kuesioner yang disebarkan kepada masyarakat, diketahui bahwa masyarakat mengetahui tentang keberadaan BUMDes yang berdiri sejak tahun 2018 dan berada pada dusun Tani Mulia desa Sialang Dua Dahan, mayoritas masyarakat merasakan manfaat terkait keberadaan BUMDes Bina Usaha terkhusus pada unit usaha isi ulang air minum dan gas LPG yang memudahkan masyarakat yang membutuhkan pengisian ulang air minum ataupun

mencari gas LPG untuk kebutuhan memasak. Namun dibalik kebermanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat, masyarakat menyayangkan manajemen pengelolaan BUMDes yang masih kurang baik. Unit usaha yang dibutuhkan masyarakat sering tutup dan jarang dibuka, sehingga menurunkan minat masyarakat untuk melakukan transaksi pada BUMDes.

Selain itu, sosialisasi dan branding yang kurang dilakukan pihak BUMDes dalam memperkenalkan unit usahanya sehingga masyarakat lebih memilih bertransaksi pada tempat usaha yang lebih baik manajemen dan pelayanannya. Kurangnya sosialisasi juga menyebabkan sebagian masyarakat tidak mengetahui fungsi sebenarnya adanya BUMDes. Meskipun pada wawancara sebelumnya dengan ketua BUMDes telah menyampaikan bahwa sudah dilakukan sosialisasi pada saat rapat ataupun pertemuan desa, agar dapat bertransaksi dengan unit usaha yang dimiliki oleh BUMDes namun sepertinya sosialisasi tersebut kurang masif apabila hanya dilakukan pada saat pertemuan desa saja.

Hal tersebut membuktikan bahwa masih kurang maksimalnya usaha yang dilakukan oleh pengurus dalam pengelolaan BUMDes, yang seharusnya pihak pengurus BUMDes dapat meningkatkan dalam pengelolaannya dengan mengadakan sosialisasi tentang keberadaan dari BUMDes kepada masyarakat, agar seluruh masyarakat dapat mengetahui keberadaan BUMDes. Pengurus juga harus dapat menarik perhatian sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat desa Sialang Dua Dahan, apalagi bagi masyarakat yang tinggal agak jauh keberadaannya dari keberadaan BUMDes Bina Usaha, maka terciptanya kepedulian dan keterlibatan aktif masyarakat dapat menghilangkan sikap apatis di kalangan mereka.

Berdasarkan penjelasan di atas maka terdapat kesesuaian terhadap teori mengenai indikator faktor penghambat BUMDes menurut Catra (2021; 838) dijelaskan bahwa faktor penghambat BUMDes dikelompokkan menjadi 5 yaitu:

- a. Kepemimpinan, Manajerial, dan Tata Kelola (KMT);
- b. Skala dan Jangkauan Usaha;
- c. Emansipasi Lokal;
- d. Kerjasama;
- e. Tradisi Berdesa.

Melihat kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa hampir seluruh indikator yang menghambat terdapat pada BUMDes Bina Usaha Desa Sialang Dua Dahan, dan selanjutnya diharapkan BUMDes Bina Usaha dapat segera menanggulangi permasalahan yang dihadapi sehingga BUMDes Bina Usaha menjadi BUMDes yang berkembang dan maju.

Factor Dominan dalam Menghambat Perkembangan BUMDes Bina Usaha Desa Sialang Dua Dahan

Setelah melihat berbagai pemaparan mengenai faktor penghambat BUMDes Bina Usaha baik melalui wawancara ataupun jawaban-jawaban pada kuesioner yang di sebar, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang dominan dalam menghambat perkembangan BUMDes Bina Usaha desa Sialang Dua Dahan, yaitu:

- a. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Masih Kurang

Permasalahan manajemen pengelolaan unit usaha pada BUMDes menjadi masalah utama apabila jatuh ketangan SDM yang masih kurang memiliki kecakapan dalam menjalankan tugas atau pun unit usaha yang dimiliki, hal ini dibuktikan oleh beberapa fakta lapangan sebagai berikut:

- 1) Sebagian tenaga kerja BUMDes tidak mengenyam pendidikan yang tinggi

Saat melakukan penelitian, peneliti melihat dan mengetahui bahwa sebagian pekerja di BUMDes Bina Usaha tidak memiliki pendidikan yang tinggi bahkan tidak menyelesaikan Sekolah Dasar sehingga menyebabkan kurang baiknya pengelolaan pada BUMDes itu sendiri.

- 2) Tenaga kerja di BUMDes Bina Usaha tidak menguasai teknologi dengan baik

Fakta selanjutnya yang ditemukan di lapangan bahwa tenaga kerja pada BUMDes Bina Usaha tidak menguasai teknologi dengan baik seperti pengoperasian komputer sehingga mengerjakan laporan ataupun tugas lainnya tidak maksimal.

3) Kurangnya ilmu pembukuan keuangan

Selanjutnya tenaga kerja BUMDes tidak kompeten dalam melakukan pembukuan keuangan, hal ini dibuktikan dengan adanya pemberian upah terhadap orang yang berada di luar BUMDes agar melakukan pembukuan keuangan. Tentunya apabila BUMDes Bina Usaha memiliki seseorang yang ahli dalam hal tersebut, tidak perlu memberikan upah kepada orang lain di luar kepengurusan BUMDes untuk melakukan pembukuan keuangan.

Hal di atas disebabkan karena kurangnya pelatihan dalam mengelola dan tidak memberikan tugas kepada seseorang yang ahli pada bidangnya. Kekurangan kemampuan SDM dalam mengelola unit usaha tentunya akan berdampak pada kepercayaan dan kepuasan masyarakat akan BUMDes. Sehingga apabila pengelolaan BUMDes dilakukan dengan baik tentunya akan meningkatkan keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dan bertransaksi dengan unit usaha yang dimiliki oleh BUMDes.

Solusi dalam meningkatkan kecakapan pada pihak pengelola BUMDes ataupun karyawan unit usaha pada BUMDes yakni membuat program pelatihan untuk manajemen, pelatihan membuat laporan keuangan. Pelatihan BUMDes sangat penting, karena mengingat para pengelola BUMDes adalah pilar utama roda BUMDes.

b. Kurangnya kerjasama dan komunikasi di antara pemerintah desa dan BUMDes Bina Usaha

Kurangnya kerjasama menjadi factor penghambat yang dominan antara pemerintah desa dan pihak BUMDes. Hal ini terjadi dikarenakan di antara pemerintah desa dan pihak BUMDes sedikit tertutup dan kurang berkomunikasi sehingga kerjasama yang terjalin kurang maksimal. Kurangnya komunikasi dan kerja sama ini dibuktikan pada saat pelaksanaan kegiatan audit lembaga BUMDes tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan audit tersebut dan selalu pihak desa yang mengikuti pelaksanaan audit tersebut, selain itu pihak BUMDes juga tidak ada melakukan laporan keuangan kepada pihak pemerintah desa setiap tahunnya.

Solusinya dalam meningkatkan kerjasama di antara pihak pemerintah desa dan pihak BUMDes adalah menjalin atau memperbaiki komunikasi dengan mengadakan rapat pembahasan khusus mengenai strategi yang harus dilakukan agar unit usaha yang terbengkalai dapat hidup kembali dan unit usaha yang sudah berjalan menjadi lebih maksimal.

Selain memperbaiki kerjasama dengan pihak pemerintahan desa, tentunya organisasi BUMDes harus memperbaiki kondisi kerjasama internal pengurus BUMDes agar tetap solid dan memiliki keinginan untuk belajar serta memiliki visi untuk memajukan masyarakat sesuai dengan tujuan diadakannya BUMDes sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c. Kurangnya pengawasan dari Pemerintah Desa

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintahan desa sangat minim. Pemerintahan desa tidak melakukan pemanggilan dan tidak mengecek ada tidaknya laporan dari pihak BUMDes tentang anggaran yang dikelola oleh BUMDes, hal tersebut menyebabkan tidak adanya kontrol bagi pihak BUMDes Bina Usaha sehingga merasa tidak diawasi dan fungsi BUMDes tidak berjalan optimal.

Selain itu pemerintah desa juga tidak melakukan pemberian sanksi terhadap pihak BUMDes dan tidak memberikan ketegasan sehingga akhirnya BUMDes Bina Usaha berjalan di tempat tanpa adanya pengawasan pemerintah. Diharapkan setelah ini pemerintah berkoordinasi untuk melakukan pengawasan agar BUMDes Bina Usaha dapat memajukan masyarakat desa Sialang Dua Dahan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan yang sebelumnya telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. BUMDes merupakan lembaga ekonomi ditingkat pedesaan. BUMDes Bina Usaha merupakan lembaga yang bertujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Sialang Dua Dahan. BUMDes Bina Usaha memiliki tujuan untuk mensejahterahkan rakyat dalam program yang mereka laksanakan. Namun dalam pelaksanaannya mereka memiliki berbagai hambatan yang membuat beberapa bidang usaha tidak berjalan yakni unit usaha penyewaan molen dan penyewaan traktor. Hal tersebut terkendala dikarenakan banyak faktor yakni, tata kelola pengurus yang masih kurang memadai, kerjasama antara pengurus pengurus BUMDes dan pemerintahan desa yang masih kurang, emansipasi masyarakat akan BUMDes yang kurang sehingga membuat proses usaha di BUMDes tidak berjalan dengan baik serta SDM yang pengurus BUMDes yang belum kompeten.
- b. Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat diketahui yang menjadi faktor dominan dalam menghambat perkembangan BUMDes Bina Usaha Desa Sialang Dua Dahan adalah (1) kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) masih kurang, (2) kurangnya kerja sama dan komunikasi di antara pemerintah desa dan bumdes bina usaha, dan (3) Kurangnya pengawasan dari pemerintah desa.

Kemudian, saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah:

- a. Bagi Pemerintah Desa Sialang Dua Dahan harus memberikan pembinaan maupun pelatihan yang maksimal terhadap pelaksana BUMDes Bina Usaha agar lebih mengenal potensi-potensi yang dapat di dimanfaatkan untuk meningkatkan program-program dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan meningkatkan perekonomian.
- b. Bagi pengelola BUMDes Bina Usaha perlu melakukan sosialisasi yang lebih mendalam tentang keberadaan BUMDes agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami rencana yang dilaksanakan oleh BUMDes Bina Usaha. Pengelola BUMDes Bina Usaha harus melakukan penguatan kemitraan atau peningkatan kerjasama yang baik dengan BUMDes atau lembaga ekonomi dari desa-desa lainnya yang di nilai sudah memiliki perkembangan yang lebih baik. Selain itu senantiasa memperbaiki hubungan dengan pemerintahan desa serta bertanggung jawab dan senantiasa belajar dalam melaksanakan tugas.
- c. Bagi Pemerintah Desa hendaknya mampu bersikap tegas akan pelaksanaannya BUMDes yang tidak melaksanakan aturan yang berlaku dan berani memberikan Sanksi yang memberikan efek jera pada pelanggar Hukum jika terbukti bersalah dalam pengelolaan BUMDes.

5. Daftar Pustaka

- Abdussamad, Zuchri. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: CV. Syakir Media Press
- Anggreni Das, Nidia. (2022) Penguatan Lembaga Bumrag Puro Nagari Koto Laweh, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok. Vol.1, No.11, November 2022
- Deden Angwarudin (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jurnal Ilmu Pertanian dan Peternakan Volume 8 Nomor 2 Desember 2020
- Irawati, Erni. (2021). Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan Pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Vol.2 No.2 Juli 2021
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2014). Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.

- Karim Pane, Majid. (2021). Klasifikasi Data Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Penerimaan Bantuan Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Bengkulu. *Jurnal Media Infotama* Vol.17 No. 1 Februari 2021
- Moleong, Lexy J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Rosda
- Peni Alvera (2021). Analisis Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sukajadi
- Perlianti (2022). Analisis Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Margolembo Dalam Peningkatan PADes
- Prasetyo, Catra Ari dkk. (2021). Faktor-Faktor Penghambat Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Layar Bertuah Desa Kelong VOL: 2, NO: 2, Tahun: 2021
- Republik Indonesia, (2015). Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Jakarta: Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Jakarta: Sekretaris Negara.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2017). Undang-undang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Jakarta: Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Republik Indonesia. (2021) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Jakarta: Presiden Republik Indonesia
- Rosidin Utang. (2019). *Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. Pustaka Setia: Bandung
- Saepudin, E, Agustini, D.A. Agung, B. (2018). *Partisipasi Masyarakat Ada Program Desa Mandiri Pangan Di Kabupaten Bandung*. Sosiohumaniora
- Soebardhy, dkk, (2020). *Kapita Selekt Metodologi Penelitian*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suparji. (2019). *Pedoman Tata Kelola Bumdes*. Jakarta Selatan: UAI Press.
- Widiastuti, Harjanti. (2019). Menakar tata kelola badan usaha milik desa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* ISSN 1979-6471 E-ISSN 2528-0147
- Wirandini, Dewi Asmia Sulistia dkk. (2022). Analisis Strategi Pengembangan Bumdes Dalam Peningkatan Pades Pada Masa Pandemi Covid-19. *Journal Develoment Economic and Social* Volume 1 No 2 Tahun 22 Univesitas Brawijaya